

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, *et al.*, 2016, *Penjelasan Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Indonesia Institute for Independent Judiciary (LeiP), Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2003, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- , 2008, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., *et al.*, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dan Farid, Andi Zainal Abidin, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakanaksanaan pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung,.
- Marbun, SF, dkk., 2001, *Hukum Adminisrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marbun, SF, *et al.*, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Admnistrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Marbun, SF, dan MD, Moh. Mahfud, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- , 2016, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1983, *Potensi Kejahatan korupsi di Inodnesia*, PT Bina Aksara, Yogyakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Santosa, Prayitno Imam, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Pt Alumni, Bandung.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Syarief, Laode M, dan Purwoleksono, Didik E (Editor), *Hukum Anti Korupsi*.
- Tongat, 2008, *Dasar-dasa Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Wijayanto dan Zachrie, Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab, Akibat, dan Prosepk Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Wiyono, R, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

C. Penelitian

Alverico, Mikho, 2014, *Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 Atas Nama Terpidana Sudjiono Timan)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Munandar, Sutopo Aris, 2016, *Penerapan Asas Diskresi oleh Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Polres Sleman*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sitompul, Jaya P, 2012, *Analisis Yuridis Perbedaan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Kepala Daerah sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan APBD untuk Kepentingan Pribadi atau yang Tidak Sesuai Peruntukannya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

D. Artikel Jurnal

Hiariej, Eddy O.S., “Pasal Keranjang Sampah”, *Kompas*, 7 Mei 2015.

Fathudin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Persepektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015

Sahlan, Mohammad, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 2, Volume 23, April 2015

Simamora, Janpatar, “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Peuntut Umum terhadap Vonis Bebas”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, April 2014.

Syamsudin, M., “Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.

Utami, Niken Subekti Budi, “Putusan”, *Bahan Kuliah*, Kuliah Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, November 2014.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 25/PUU-XIV/2016, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Mahmakah Agung Nomor 979 K/Pid/2004 perihal Pemeriksaan tingkat Kasasi atas nama Hendrobudiyanto tanggal 10 Juni 2005.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 perihal Pemeriksaan tingkat Kasasi atas nama Theo F. Toemion tanggal 28 Februari 2007.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg atas nama Terdakwa Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin, tanggal 1 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2862 K/Pid.Sus.2015 perihal Pemeriksaan tingkat Kasasi atas nama Terdakwa Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin, tanggal 28 April 2016.

Putusan Pra Peradilan No. 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms. atas nama Pemohon Tjutjun Sunarti Rochidie tanggal tanggal 3 Februari 2016.

F. Kamus

Garner, Bryan A. (Editor), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, St. Paul.

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeliono, *et al.*, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

G. Sumber Internet

Akbar, M.Fatahillah, "Sulitnya untuk Korupsi",
<http://www.jawapos.com/read/2017/02/12/109030/sulitnya-untuk-korupsi>,
diakses pada 15 Februari 2017

Anonymous, “Corruption Perception Index” 2015,
<http://www.transparency.org/cpi2015#results-table>, diakses 15 Oktober 2016.

Anonymous, “Mandatory and Other Criminal Offences”
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan027816.pdf>,
diakses pada 7 Februari 2017.

Anonymous, “Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan”
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>, diakses 28 Februari 2017.

Hari Wibowo, Laksono, “Vonis Bebas Perkara Korupsi Dinilai Konservatif”,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/03/23000021/Vonis.Bebas.Perkara.Korupsi.Dinilai.Kontroversial>, diakses 15 Oktober 2016.

Sahbani, Agus, “Akhirnya MK Larang Jaksa Ajukan PK”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk>, diakses pada 18 Februari 2017.

Saputri, Dessy Suciati, “JK: Kepala Daerah bisa Ambil Hak Diskresi”,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/05/31/o808rg335-jk-kepala-daerah-bisa-ambil-hak-diskresi>, diakses pada 11 Maret 2017.